

TESIS

**PENGARUH SOCIAL COST TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN SOSIAL LINGKUNGAN DIMEDIASI
KINERJA SOSIAL LINGKUNGAN**

***THE EFFECT OF SOCIAL COST ON THE EXTENT OF
SOCIAL ENVIRONMENTAL DISCLOSURE MEDIATED BY
SOCIAL ENVIRONMENTAL PERFORMANCE***

HASBULLAH HAJAR



**PROGRAM MAGISTER SAINS AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

PENGARUH SOCIAL COST TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL LINGKUNGAN DIMEDIASI KINERJA SOSIAL LINGKUNGAN

THE EFFECT OF SOCIAL COST ON THE EXTENT OF SOCIAL ENVIRONMENTAL DISCLOSURE MEDIATED BY SOCIAL ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HASBULLAH HAJAR
P3400215022**



kepada

**PROGRAM MAGISTER SAINS AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



TESIS

**PENGARUH SOCIAL COST TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN SOSIAL LINGKUNGAN DIMEDIASI
KINERJA SOSIAL LINGKUNGAN**

**THE EFFECT OF SOCIAL COST ON THE EXTENT OF
SOCIAL ENVIRONMENTAL DISCLOSURE MEDIATED BY
SOCIAL ENVIRONMENTAL PERFORMANCE**

disusun dan diajukan oleh

**HASBULLAH HAJAR
P3400215022**

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, 2019

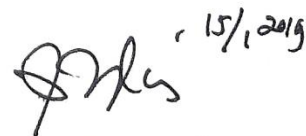
Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Dr. Darwis Said, S.E., M.SA., Ak., CA
NIP. 196509251990022001



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP. 196503071994041003

Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. R.A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc.Sc., CA
NIP. 19630515199203100



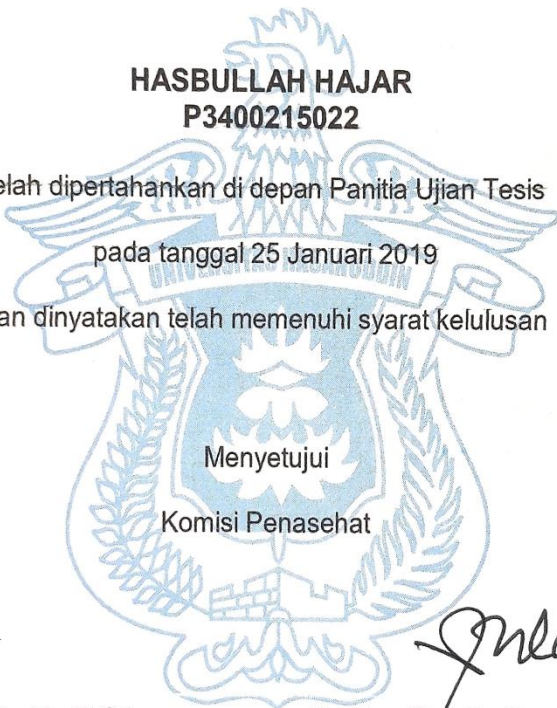
TESIS

PENGARUH SOCIAL COST TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL LINGKUNGAN DIMEDIASI KINERJA SOSIAL LINGKUNGAN

disusun dan diajukan oleh

HASBULLAH HAJAR
P3400215022

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 25 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui

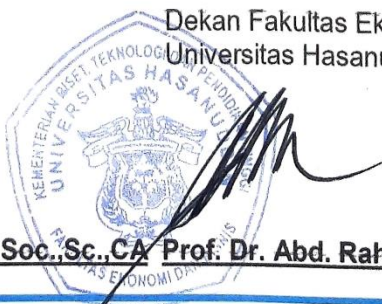
Komisi Penasehat

Dr. Darwis Said, SE., Ak., M.SA
Ketua

Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Amayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hasbullah Hajar
NIM : P3400215022
Jurusan / Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH SOCIAL COST TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SOSIAL LINGKUNGAN DIMEDIASI KINERJA SOSIAL LINGKUNGAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,


Hasbullah Hajar



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh *Social Cost* Terhadap Luas Pengungkapan Sosial Lingkungan Dimediasi Kinerja Sosial Lingkungan”. Salam dan syalawat peneliti haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Izinkanlah peneliti mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tesis ini. Ucapan terima kasih ini peneliti berikan kepada:

1. Ayahanda Rustan dan Ibunda Alm. Hj. Habbasiah sebagai pembimbing utama dalam hidup peneliti, pendidik dan pelindung serta membesarkan dan mendidik peneliti untuk bersifat terbuka, berani, sabar dan bijaksana yang memiliki peran tak terhingga, sehingga rasa terima kasih ini tidaklah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan saya kepada Ayah dan Ibu.
2. Bapak Dr. Darwis Said, SE.,Ak.,M.SA. dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,Ak.,M.Si. sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.
3. Bapak Dr. Alimuddin, SE.,MM.,Ak.,CPMA. Ibu Dr. R.A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA dan Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku tim penguji atas penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. R. A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak-Ibu Dosen Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selama ini tak kenal lelah mentransfer ilmu khususnya kepada peneliti serta kepada mahasiswa fakultas ekonomi secara umum, peneliti menyadari bahwa peneliti belum mampu membalas jasa bimbingan dan ibu dosen. Peneliti hanya mengucapkan



terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan didikannya selama ini.

6. Muh. Rachmat, Muh. Ridwan, Muh. Arfan, Muh. Ridha, Agri Sawan, Muh. Iqbal, Muh. Yusuf, Abd. Saming, Ismayani, Ulfah, Ainil, Nurhani, St. Nafisa, Anita Nursanti, Nerlaela, Dwibin, dan seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 2015 yang tidak sempat disebut namanya, terima kasih banyak karena telah banyak membantu, menyemangati, dan memberikan masukan kepada peneliti.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, 25 Januari 2019

Peneliti,



HASBULLAH HAJAR



ABSTRAK

HASBULLAH HAJAR. *Pengaruh Social Cost terhadap Luas Pengungkapan Sosial Lingkungan Dimediasi Kinerja Sosial Lingkungan (dibimbing oleh Darwis Said dan Syarifuddin Rasyid).*

Penelitian ini bertujuan mengulas pengaruh hubungan antara *social cost*, luas pengungkapan sosial lingkungan, dan kinerja sosial lingkungan.

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 194 dari 612 total populasi perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah *explanatory research*. Data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan pengukuran kinerja sosial lingkungan perusahaan oleh PROPER. Data dianalisis dengan analisis SEM yang menggunakan *software* AMOS dengan satu variabel intervening.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *social cost* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial lingkungan perusahaan. Variabel *social cost* juga berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Variabel kinerja sosial lingkungan perusahaan berpengaruh secara positif terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Variabel kinerja sosial perusahaan mampu memediasi hubungan antara *social cost* dengan luas pengungkapan sosial lingkungan perusahaan.

Kata Kunci: Luas Pengungkapan Sosial Lingkungan, Kinerja Sosial Lingkungan, *Social Cost*, Teori Legitimasi.



ABSTRACT

HASBULLAH HAJAR. *The Effect of Social Cost on the Extent of Social Environmental Disclosure Mediated by Social Environmental Performance* (supervised by **Darwis Said** and **Syarifuddin Rasyid**)

The aim of this research is to examine the effect of relationship among social cost, the extent of social environment disclosure, social environmental performance.

The study was an explanatory research using quantitative method. The sample consisted of 194 out of 612 total population of companies listed in Indonesia Stock Exchange. The data were secondary data in the form of annual reports, sustainability reports, and companies' social environmental performance measurement by PROPER. The data were analysed using SEM analysis by means of AMOS software with one intervening variable.

The results of the research indicate that social cost positively affect companies' social environmental performance. The social cost variable also affects the extent of companies' social environment disclosure. Then, the company's social environmental performance variable positively affects the extent of companies' social environment disclosure. The company's social performance variables are able to mediate the relationship between social cost and the extent of companies' social environment disclosure.

Key words: Extent of social environmental disclosure, social environmental performance, social cost, legitimacy theory.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 <i>Legitimacy Theory</i> (Teori Legitimasi)	13
2.1.2 <i>Social Cost</i> (Biaya Sosial).....	15



2.1.3	Kinerja Sosial Lingkungan Perusahaan	20
2.1.4	Luas Pengungkapan Sosial Lingkungan	26
2.2	Tinjauan Empiris	37
BAB III Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis		40
3.1	Kerangka Pemikiran.....	40
3.2	Pengembangan Hipotesis	43
3.2.1	Pengaruh Biaya Sosial Terhadap Kinerja Sosial.....	43
3.2.2	Pengaruh biaya sosial terhadap pengungkapan sosial ...	45
3.2.3	Pengaruh kinerja sosial terhadap luas pengungkapan sosial	46
3.2.4	Pengaruh tidak langsung <i>social cost</i> terhadap luas pengungkapan sosial.....	48
BAB IV Metode Penelitian		50
4.1	Rancangan Penelitian	50
4.2	Tempat dan Waktu Penelitian	50
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan sampel.....	51
4.4	Jenis dan Sumber Data.....	52
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	53
4.6	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	53
4.6.1	Variabel Penelitian.....	53
4.6.2	Definisi operasional	54
4.6.2.1	<i>Social Cost</i> (X1).....	54
4.6.2.2	Kinerja Sosial (Y1)	55
4.6.2.3	Luas pengungkapan sosial (Y2).....	56
4.7	Instrumen Penelitian	57
4.8	Teknik Analisis Data.....	58
4.9	Model Penelitian	61
BAB V Hasil Penelitian		63
5.1	Deskripsi Data.....	63
5.1.1	Normalitas Data	66
5.2.1	Normalitas Distribusi Data	66
5.2.2	Uji <i>Outlier</i> Data	67



5.3 Pengujian Hipotesis	71
5.4 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	78
BAB VI Pembahasan	84
6.1 Pengaruh <i>Social Cost</i> Terhadap Kinerja Sosial Lingkungan....	84
6.2 Pengaruh <i>Social Cost</i> Terhadap Pengungkapan Sosial	86
6.3 Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Pengungkapan Sosial	89
6.4 Pengaruh <i>Social cost</i> terhadap Pengungkapan Sosial melalui Kinerj sosial.....	90
BAB VII Penutup	94
7.1 Kesimpulan	94
7.2 Implikasi.....	97
7.3 Keterbatasan.....	97
7.4 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
Lampiran	103



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Kriteria Pemeringkatan PROPER	23
2.2	Indikator GRI-G4.....	29
5.1	<i>Descriptive Statistics</i>	63
5.2	<i>Assesment of Normality</i>	67
5.3	<i>Mahalanobis d-squares</i>	68
5.4	<i>Goodness of Fit (GoF)</i>	72
5.5	Estimasi <i>Regression Weight</i>	74
5.6	Estimasi <i>Standardized Regression Weight</i>	75
5.7	Hasil Uji Hipotesis	76
5.8	<i>Squared Multiple Correlation</i>	77
5.9	Estimasi <i>Standardized Direct Effect</i>	78
5.10	Estimasi <i>Standardized Indirect Effect</i>	79
5.11	Estimasi <i>Standardized Total Effect</i>	80
5.12	Hasil Uji Sobel.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Daerah <i>Legitimacy gap</i>	40
3.2 Model Teoritik.....	42
3.3 Kerangka Konseptual	43
5.1 Hubungan Variabel Penelitian	83



DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL

Singkatan/symbol	Keterangan
BANSOS	Bantuan Sosial
BEI	Bursa Efek Indonesia
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
<i>DER</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DSAK	Dewan Standar Akuntansi Keuangan
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i>
PROPER	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
SR	<i>Sustainability Reporting</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I Definisi Operasional	103
II Sampel Perusahaan.....	104
III <i>Social Cost</i> Perusahaan Sampel	111
IV <i>Ceklist</i> Pengungkapan Sosial Lingkungan.....	118
V Indeks Pengungkapan Sosial Lingkungan.....	125
VI Kinerja Sosial Lingkungan Perusahaan	132
VII Hasil Analisis Statistik.....	139



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fakta bahwa kegiatan perusahaan khususnya perusahaan yang lingkup usahanya berorientasi pada ekstraksi dan eksploitasi sumber daya alam, telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem maupun sosial tentu tidak terelakkan lagi. Contoh kasus seperti PT. Freeport di Papua yang mengeksploitasi tambang emas secara intensif sehingga menghasilkan lubang dengan diameter 8 kilometer yang merusak ekosistem alam secara masif, lalu Lapindo dimana aktifitas perusahaan mereka menghasilkan lumpur jutaan ton kubik yang mengakibatkan ribuan masyarakat Siduarjo kehilangan harta benda dan masih banyak lagi kasus lain merupakan contoh wujud refleksi daripada ketimpangan industri di Indonesia.

Mengemukanya konsep *Corporate Social responsibility* (CSR) sebagai salah satu konsep yang menuntut pelebaran tanggungjawab perusahaan sampai lingkungan dan sosial telah menjadi nafas segar bagi masyarakat, pemerintah, dan para pemerhati lingkungan. Selain itu, dengan adanya pengembangan konsep CSR tersebut oleh para akademisi, cendekiawan, dan pakar yang dilakukan secara berkesinambungan juga telah meningkatkan integritas konsep CSR. Dan pada akhirnya, dengan adanya intervensi serta atensi oleh pemerintah, maka CSR di Indonesia telah menjadi konsep yang diimplementasikan dan bahkan dimandatkan bagi perusahaan-perusahaan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa CSR dalam konsepsi hingga

ntasinya masih mengalami berbagai permasalahan, misalnya orientasi
aan CSR apakah bersifat sukarela atau mandatori ataupun bagaimana



bentuk CSR perusahaan terhadap dampak non material akibat aktifitasnya dan masih banyak persoalan lainnya yang belum teratasi. Permasalahan tersebut, kontan mengundang para akademisi, peneliti, serta cendekiawan dari berbagai macam disiplin ilmu untuk membantu memecahkan masalah CSR ini.

Dalam rana disiplin ilmu akuntansi, permasalahan fundamental yang menjadi perhatian para akademisi dan praktisi akuntansi adalah terkait laporan CSR. Pada kebanyakan perusahaan, informasi pengungkapan CSR yang mereka sajikan dalam pelaporan CSR umumnya hanya berupa informasi yang material. Sementara informasi yang dianggap tidak material misalnya dampak sosial dan lingkungan tidak akan disajikan. Selain itu, konten yang disajikan pada laporan CSR hanya berupa informasi yang terfokus pada kebutuhan *shareholders* dan *stakeholders* yang memiliki hubungan perihal keuangan dengan perusahaan, sementara kebutuhan informasi *stakeholders* yang tidak bersentuhan dengan keuangan perusahaan. Namun, tidak bisa juga dipungkiri bahwa kondisi tersebut terjadi karena belum adanya pedoman baku pelaporan CSR yang dirancang oleh lembaga otoritas terkait, sehingga pengungkapan sosial lingkungan perusahaan cenderung tidak terarah dan tidak berbobot.

Perlu juga dipahami bahwa laporan tanggungjawab sosial lingkungan bertujuan agar perusahaan bisa menginformasikan serta mengkomunikasikan bentuk tanggungjawab serta kinerja sosial lingkungannya kepada *stakeholdersnya*. Laporan ini juga bisa menginisiasi opini *stakeholdersnya* guna meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa bentuk dari laporan CSR ini juga akan sangat berpengaruh bagi *stakeholdersnya* dan tentunya *shareholdersnya*. Meskipun belum ada pedoman

yang diregulasikan pemerintah namun perusahaan tetap perlu
imbangankan untuk menggunakan pedoman lain dalam membuat laporan



CSR yang reliabel. Dan salah satu pedoman pembuatan laporan CSR yang banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yaitu GRI.

Konstrak GRI berbasis pada *triple bottom line* Elkington (1988), yakni *Profit, People, earth*. Ketiga konsep tersebut, pada GRI disimbolkan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indikator dari ketiga konsepsi tersebut merepresentasi kinerja ekonomi, dampak aktifitas produksi, aktifitas CSR serta hal terkait lainnya yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan CSRnya. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan sesuai dengan kinerja ekonomi, dampak aktifitas produksi, aktifitas CSR serta hal terkait lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, karena pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi informasi bagi *shareholders*, dimana informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Informasi pada pengungkapan CSR juga menjadi aspek krusial bagi *stakeholders* utama yakni pemerintah dan masyarakat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan yang akan dibuat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, pengungkapan sosial lingkungan sebagai manifestasi transparansi perusahaan terhadap *stakeholders* memang merupakan sesuatu yang sangat penting. Mengingat hal tersebut akan menentukan kesuksesan dan masa depan perusahaan. Tetapi akan menjadi dilematis bagi perusahaan jika *mindset* paradigma bisnis konservatif yang memprioritaskan maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya masih membelenggu mereka.

Kartini (2011) mengungkapkan faktor krusial yang menjadi penyebab minimnya pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (CSR) yang disajikan

poran yakni:



1. Akuntansi keuangan hanya berfokus pada kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi. Fokus itu cenderung terbatas pada para *stakeholders* yang memiliki kepentingan keuangan dengan perusahaan. Karena itu, fokus laporan informasi dalam laporan keuangan tertuju pada pihak-pihak yang memiliki relasi keuangan dengan perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan mitra bisnis lainnya. Sementara masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dianggap bukan *stakeholders* karena tidak memiliki relasi keuangan dengan perusahaan.
2. Pertimbangan utama dalam proses akuntansi dan laporan keuangan adalah "materialitas" informasi yang disajikan. Artinya, hanya informasi yang dinilai material yang boleh disajikan dalam laporan keuangan. Informasi CSR dianggap tidak material untuk disajikan dalam laporan keuangan karena sulit mengkuantifikasi *cost* dan *benefit*-nya.
3. Laporan akuntansi cenderung memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaat ekonominya di masa datang sebagai beban periodik. Pengorbanan untuk CSR dianggap tidak memiliki manfaat tersebut sehingga harus diperlakukan sebagai beban periodik. Konsekuensinya, kepedulian pebisnis pada CSR akan mengurangi laba, ekuitas pemilik, dividen, kompensasi manajemen, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Inilah yang menyebabkan banyak pebisnis enggan melaksanakan CSR.
4. Akuntansi masih mengadopsi "asumsi entitas" yang mengharuskan

sahaan diperlakukan sebagai suatu entitas yang berbeda dari para *stakeholders*nya. Implikasinya, jika suatu transaksi atau peristiwa tidak



berdampak langsung terhadap perusahaan, maka harus diabaikan untuk tujuan akuntansi. Karena itu, informasi CSR atau eksternalitas yang disebabkan oleh tindakan dan laporan perusahaan umumnya diabaikan dalam laporan akuntansi, karena dinilai tidak memberi dampak langsung terhadap ukuran kinerja keuangan.

5. Proses akuntansi hanya terfokus pada item-item yang dapat "dikendalikan" perusahaan. Item-item itu harus sudah lolos ujian "*recognition criteria*". Yaitu
 1. Memenuhi syarat "*definition*" sebagai item laporan keuangan.
 2. Dapat diukur nilainya secara andal.
 3. Informasinya relevan untuk pemakai.

Kelima faktor di atas menyebabkan minimnya konten informasi sosial dan lingkungan yang disajikan dalam laporan keuangan ataupun laporan tahunan. Untuk mengatasinya, para akuntan khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) diharapkan berperan aktif melakukan reformasi akuntansi terhadap sejumlah keterbatasan tersebut. Secara umum, reformasi akuntansi perlu merujuk pada perspektif *triple bottom line of business* (Elkington, 1988).

Selain pengungkapan CSR yang komprehensif, perusahaan saat ini, khususnya bagi perusahaan industri dan ekstraktif juga tidak pernah lepas dari tuntutan *stakeholders*, khususnya dari *stakeholders* eksternal untuk menghasilkan sebuah kinerja sosial lingkungan yang maksimal. Untuk mencapai ini, perusahaan dituntut untuk membuat suatu program kerja CSR yang tidak hanya bermanfaat tapi juga harus tepat sasaran. Agar ini bisa tercapai maka dalam pembuatan program kerja CSR, diperlukan kordinasi serta kolaborasi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan tentunya masyarakat secara luas.

hak ini memiliki peran masing-masing dalam konteks kemitraan CSR.

asing-masing yakni:



1. Peran pemerintah
 1. Mewakili kepentingan para pemilih.
 2. Sebagai negosiator dan pembuat komitmen.
 3. Menyediakan regulasi yang mengatur semua sektor serta menyiapkan kebijakan nasional.
 4. Mengawasi kinerja dan mengambil tindakan untuk mencapai keteraturan.
2. Perusahaan
 1. Mewakili kepentingan *shareholders*.
 2. Mencari keuntungan ekonomi.
 3. Bertindak mandiri dalam mengoperasikan perusahaan.
3. Masyarakat secara luas
 1. Mewakili pemangku kepentingan yaitu pihak diantara masyarakat yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktifitas organisasi.
 2. Mengutamakan nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang berhubungan dengan lingkungan, HAM, sosial dan pembangunan.
 3. Mengawasi pemerintah dan organisasi atau perusahaan.

Ketiga otoritas tersebut, yakni pemerintah, perusahaan, dan masyarakat tentu memiliki kepentingan masing-masing, dan diharapkan dengan adanya koordinasi dan musyawarah ketiga pihak maka *conflict of interest* bisa direduksi, karena rancangan program kerja CSR barulah akan baik jika ada sinergitas diantara ketiga pihak tersebut.

Setelah program kerja terbentuk, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Pada tahapan ini, anggaran akan dikururkan sebagai *social cost*. Terdapat gejala empiris menarik yang patut dicermati terkait

ran *social cost* ini. Yakni bahwa masih tingginya problematika sosial dan an akibat eksistensi perusahaan, sementara perusahaan telah



mengeluarkan *social cost* yang banyak untuk melakukan serangkaian tindakan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Watt dan Zimmerman (1978) menyatakan bahwa *social cost* yang dikeluarkan perusahaan seharusnya memiliki kemanfaatan meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat, namun pada kenyataannya ada tendensi bahwa *social cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi sia-sia dikarenakan *social cost* tersebut tidak bisa meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dalam rangka memperoleh legitimasi.

Ulmann (1985) mengungkapkan bahwa Problematika ketidakefektifan manfaat *social cost* dikeluarkan oleh perusahaan disebabkan oleh disorientasi alokasi anggaran. Berapa pun banyaknya *social cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan, jika distribusi *social cost* tidak tepat sasaran dan tidak dirancang dengan terstruktur maka *social cost* tidak akan memberikan manfaat ekonomi, dan legitimasi bagi perusahaan. Jadi, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan hal ini agar *outcome* yang kehendaki bisa tercapai.

Efektifnya *social cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan direfleksikan oleh baiknya kinerja sosial lingkungan dari perusahaan. Jadi tolok ukur keberhasilan strategi distribusi *social cost* perusahaan adalah ditunjukkan dengan tingginya kinerja sosial lingkungan perusahaan. Berdasarkan literatur, pernyataan peneliti selaras dengan hasil penelitian Memed (2001) yang menyatakan bahwa pengaruh elemen *social cost* yang merupakan wujud akuntansi sosial terhadap kinerja sosial lingkungan pada perusahaan di Bursa Efek Jakarta yang mengikuti Program Kali Bersih, menunjukkan bahwa elemen-elemen *social cost* berpengaruh terhadap kinerja sosial lingkungan.

bagi perusahaan, untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial
mempertimbangkan prinsip kemanfaatan dan efisiensi. Ketika perusahaan



tidak menemukan sebuah potensi manfaat ekonomi dan sosial dari pengungkapan sosial lingkungan, maka tentu kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial lingkungannya secara luas lebih sedikit, demikian pula sebaliknya jika perusahaan menemukan sebuah potensi manfaat ekonomi dan sosial dari pengungkapan sosial lingkungan, maka kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas lebih tinggi.

Untuk mendapatkan manfaat sosial yakni legitimasi *stakeholder* dan manfaat ekonomi yakni investasi *shareholders*, maka perusahaan harus meningkatkan kinerja sosial lingkungannya melalui distribusi *social cost* yang efektif. Dan setelah kinerja sosial lingkungan yang tinggi telah dicapai oleh perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lingkungan yang luas akan lebih tinggi. Asumsi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nor Hadi (2011), Indah (2014) yang menemukan bahwa kinerja sosial lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan perusahaan.

Legitimasi *stakeholders* akan bisa diperoleh tentu dengan melakukan pengungkapan sosial, dan tidak akan ada keraguan bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya jika kinerja sosial lingkungannya memang baik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Yuni (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja sosial lingkungan terhadap pengungkapan sosial lingkungan. Yuni (2012) mengungkapkan bahwa, semakin tinggi kinerja sosial lingkungan perusahaan (klaim *stakeholders* semakin kecil) maka semakin tinggi probabilitas bagi perusahaan untuk mengungkapkan

tanggung jawab sosialnya secara luas. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian risiko (2015), dimana dari hasil penelitian tersebut



menunjukkan bahwa terdapat variabilitas pengaruh antara kinerja sosial lingkungan terhadap pengungkapan sosial lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, untuk membuktikan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *social cost*, terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dan pada penelitian ini juga akan ditambahkan sebuah variabel mediasi yakni kinerja sosial lingkungan yang akan memperantarai hubungan variabel *social cost* dengan luas pengungkapan sosial lingkungan.

Pada penelitian ini akan digunakan data sekunder. Pengujian statistik dengan menggunakan jenis data yang berbeda pada konstruk merupakan sesuatu yang masih tabu dan jarang dilakukan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang *listing* di BEI. Lalu sampel ditentukan dengan penyeleksian dengan beberapa kriteria yaitu, perusahaan yang menjadi sampel harus memenuhi memiliki dan mempublikasi laporan CSRnya baik dalam bentuk *sustainability reporting, annual reporting*, prospektus dan dokumen lainnya yang memuat konten laporan CSR perusahaan dan perusahaan harus mengikuti program penilaian kinerja sosial lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan materi yang telah diuraikan sebelumnya maka, permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan peningkatan luas pengungkapan sosial lingkungan dan kinerja sosial lingkungan dalam rangka meningkatkan legitimasi *stakeholders*. Masalah ini penting untuk dikaji agar

dan lebih memahami konsekuensi sosial dari pelaksanaan CSR.



Berdasarkan uraian masalah penelitian di atas, selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *social cost* berpengaruh terhadap tingkat kinerja sosial lingkungan?
2. Apakah *social cost* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan?
3. Apakah tingkat kinerja sosial lingkungan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan?
4. Apakah *social cost* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan melalui tingkat kinerja sosial lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *social cost* terhadap tingkat kinerja sosial lingkungan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *social cost* terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat kinerja sosial lingkungan terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *social cost* terhadap luas pengungkapan sosial lingkungan melalui tingkat kinerja sosial lingkungan.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu akuntansi sosial.
2. Memberikan sumbangsi berupa tambahan informasi terkait penelitian dibidang akuntansi sosial, khususnya berkaitan dengan pengungkapan sosial lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, sebagai sarana guna menambah pengetahuan dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data hingga penyajian dalam bentuk laporan.
2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsi saran berupa *reasoning* untuk memberikan pengungkapan sosial lingkungan yang luas.
3. Bagi akademik, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan juga referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR dalam bentuk *annual, reporting*, prospektus, laporan keuangan, dan sebagainya. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa penilaian dan pemeringkatan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan yaitu PROPER dan laporan tanggungjawab sosial lingkungan yang diperoleh dengan mencari di

serta referensi lain yang menyediakan data yang berhubungan dengan yang dilakukan.



1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan, bab ini berisi tinjauan secara umum perencanaan penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji dari berbagai sumber baik penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan judul yang diteliti sehingga menghasilkan hipotesis dan digambarkan pada kerangka pikir berupa alur penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV metode Penelitian, menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data. Bab ini menjelaskan teknik pengolahan data sampai pada penggunaan alat analisis yang digunakan peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Legitimacy Theory* (Teori Legitimasi)

Teori Legitimasi mengacu pada proses bagaimana suatu tindakan, ideologi, atau persepsi menjadi normatif dan bisa diterima oleh khalayak. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Suchman (1995). Kerangka dasar yang melandasi pemikiran dari teori legitimasi ini adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, dimana teori legitimasi ini menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas atau perusahaan harusnya berorientasi pada tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dalam masyarakat. Teori ini juga memberikan kerangka dasar pola pikir penggeseran orientasi perusahaan dari *shareholders orientation* ke *stakeholders orientation*.

Untuk menjamin dan menjaga keberpihakan (legitimasi) *stakeholders* maka, perusahaan perlu menjamin kongruensi antara keberadaan dan tujuan perusahaan terhadap pengharapan *stakeholders* (O'Donovan, 2015) karena, keberlanjutan suatu entitas atau perusahaan ditentukan oleh bagaimana perusahaan meyakinkan *stakeholdersnya* bahwa tidak ada kontradiksi antara aktifitas serta kepentingan perusahaan dengan *stakeholders*. Adapun cara untuk meyakinkan bahwa tidak ada kontradiksi antara aktifitas perusahaan dengan ekspektasi masyarakat adalah dengan melakukan pengungkapan sosial lingkungan secara luas.

Teori legitimasi dalam penelitian ini digunakan untuk menerangkan bahwa
ya kandungan informasi pengungkapan sosial lingkungan mampu



mengurangi senjangan legitimasi antara perusahaan dengan *stakeholdersnya*. Ini sejalan dengan Berthelot dan Robert, (2012) yang juga menyatakan bahwa diperlukan pengungkapan sosial lingkungan dalam rangka mengurangi senjangan legitimasi, karena pengungkapan sosial lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mengurangi senjangan legitimasi.

Wartick dan Mahon (1994) menyatakan bahwa senjangan legitimasi dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tapi harapan masyarakat terhadap perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah kearah yang berbeda, atau kearah yang sama tapi waktunya berubah.

Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungan, karena dengan berkembangannya tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa legitimasi perusahaan di mata *stakeholders* dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis (*business ethics integrity*) serta meningkatkan tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (*social responsibility*). Dan juga perlu diperlu dipahami oleh perusahaan, bahwa tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan (*social responsibility*) tidak hanya memiliki kemanfaatan untuk memperoleh legitimasi *stakeholders*, tapi juga untuk meningkatkan reputasi perusahaan, serta menjaga *image* perusahaan dimata *shareholders*, mengingat bahwa para *shareholders*

akan atensi khusus terhadap perusahaan yang memiliki kinerja sosial
an yang baik.



2.1.2 *Social Cost* (Biaya Sosial)

Menurut terminologi akuntansi, *social cost* diartikan sebagai biaya yang berhubungan dengan akuntansi sosial, meliputi biaya lingkungan, biaya karyawan, biaya produk, dan biaya komunitas sebagai perwujudan tanggung jawab sosial lingkungan akibat aktifitas perusahaan. *Social cost* yang dikeluarkan perusahaan adalah atas dasar desakan dari masyarakat dan pemerintah dalam bentuk regulasi, baik itu berupa undang-undang, PERDA, dan sebagainya. Jadi, kita bisa memahami bahwa saat ini, pengeluaran *social cost* oleh perusahaan sudah bersifat mandatori dan tidak hanya bersifat sukarela.

Di Indonesia, telah banyak regulasi maupun aturan perundang-undangan terkait *social cost* yang dikeluarkan pemerintah. diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40, pada Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 21 yang secara substansial mengatur mengenai besaran biaya tanggung jawab sosial yang harus dikeluarkan BUMN yakni 3% dari laba. Dan juga PERDA dari sejumlah daerah yang mewajibkan perusahaan mengeluarkan *social cost* sebesar 3% dari laba. Pengeluaran *social cost* dari perusahaan diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, Pengeluaran *social cost* tersebut diharapkan juga bisa memberikan manfaat bagi perusahaan baik itu manfaat ekonomi berupa menarik minat investor dan manfaat sosial berupa legitimasi (dukungan) *stakeholders*. Terkait sasaran distribusi *Social cost* akan ditentukan oleh perusahaan, sehingga

an bisa menerapkan strategi dan kebijakan pengeluaran *social cost* ndapatkan legitimasi *stakeholders*.



Program CSR dari perusahaan diharapkan bisa memberikan manfaat jangka panjang. Untuk itu, perusahaan dianjurkan untuk membuat program *environment and community development* yang di Indonesia dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Perusahaan juga bisa melakukan aktifitas sosial yang bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Ada berbagai pendapat mengenai aktifitas-aktifitas yang dapat dikategorikan sebagai aktifitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kotler dan Lee (2015) merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan, yaitu :

1. *Promotion*, adalah aktivitas sosial yang dilakukan melalui *persuasive communications* dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang.
2. *Marketing*, dilakukan melalui *commitment* perusahaan untuk menyumbangkan sebesar persentase tertentu hasil penjualannya untuk kegiatan sosial.
3. *Corporate Sosial Marketing*, dilakukan dengan cara mendukung atau pengembangan dan atau penerapan suatu *behavior change* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
4. *Corporate Philantropy*, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung.
5. *Community Volunteering*, merupakan bentuk aktivitas sosial yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan

masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa keahlian, talenta, ide, dan atau fasilitas laboratorium.



6. *Social Responsibility Business Practices*, merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, memilih memilih supplier dan atau kemasan yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Belkaoui dan Karpik (1998) mengklasifikasikan *social cost* kedalam:

1. Biaya lingkungan

Mencakup pengendalian polusi, perlidungan efek pencemaran, penelitian mengenai bahaya pencemaran, konservasi bahan baku, konservasi energi, dukungan terhadap aksi penyelamatan lingkungan. Lebih rinci, secara garis besar biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Biaya lingkungan implisit (*remedial cost*)

Biaya ini tidak terkait secara langsung dengan proses produksi suatu perusahaan, tetapi merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungannya. Yang termasuk dalam biaya lingkungan implisit adalah biaya pencemaran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya pencemaran permukaan air, dan biaya pencemaran gas udara.

2. Biaya lingkungan eksplisit (*externalities*)

Yang tergolong pada biaya ini adalah biaya pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan, dan lain-lain yang sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab perusahaan.



Dengan ini, maka biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (*environmental prevention costs*), yaitu biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan.
2. Biaya Deteksi Lingkungan (*environmental detection cost*), adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktifitas, lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak.
3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (*environmental internal failure cost*), adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (*environmental external failure*), adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

2. Tenaga kerja

Mencakup fasilitas pendidikan, jadwal pelatihan, cuti, kesehatan, dan standar keamanan, pensiunan, tenaga kerja minoritas, buletin pegawai, tenaga kerja wanita, serikat pekerja, kecelakaan, pembagian bonus. Lebih rinci, *social cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menyangkut kesejahteraan karyawan terdiri dari macam-macam biaya antara lain:

1. Gaji Karyawan
2. Tunjangan Kesejahteraan

Tunjangan kesejahteraan merupakan tunjangan yang diberikan

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai bentuk penghargaan terhadap karyawan atas kontribusi yang telah diberikan bagi



kemajuan perusahaan. Tunjangan kesejahteraan yang diberikan diantaranya tunjangan olahraga, tunjangan rumah, biaya penghargaan, pensiun, santunan hari tua, kerohanian, dan lainnya.

3. Tunjangan Sosial Karyawan

Tunjangan sosial yang diberikan meliputi perawatan kesehatan, uang cuti, Pakaian dinas, pendidikan latihan, insentif, tunjangan kematian, asuransi personal, tunjangan pemondokan anak dan lain-lain.

4. Tunjangan Pelaksanaan Tugas

Untuk memperlancar tugas-tugas karyawan, perusahaan memberikan tunjangan pelaksanaan tugas yang meliputi biaya perjalanan dinas, biaya angkutan dan biaya pindah.

5. Biaya Perumahan Karyawan

3. Produk

Mencakup pemantauan keamanan pemakai produk, pengendalian kualitas, meningkatkan perhatian masyarakat.

4. Keterlibatan terhadap masyarakat

Mencakup sumbangan, partisipasi dalam kegiatan pemerintah setempat mendukung terhadap kegiatan masyarakat, aktif terhadap kegiatan setempat, dan laporan nilai tambah.

5. Biaya untuk penghematan dan konservasi energi

Mencakup penggunaan teknologi hemat energi, menggunakan sistem manajemen ramah dan hemat listrik, menciptakan sumber energi alternatif, menggunakan alat-alat hemat energi dan sejenisnya.



2.1.3 Kinerja Sosial Lingkungan

kinerja sosial lingkungan merupakan daya dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan alam dan sosialnya yang mungkin akan muncul akibat aktivitas operasional. apabila dampak akibat operasional perusahaan baik itu dampak sosial maupun dampak lingkungan telah timbul, maka perusahaan harus tetap membayar dampak operasional yang ditinggalkannya.

Untuk mengukur kinerja sosial lingkungan tentu dibutuhkan indikator yang nantinya akan menjadi tolok ukur kinerja sosial lingkungan perusahaan. Purwanto (2006) mengungkapkan bahwa Indikator kinerja ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua yaitu indikator kinerja sosial lingkungan kuantitatif dan indikator kinerja sosial lingkungan kualitatif. Kinerja lingkungan yang bersifat kuantitatif adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan yang terkait kontrol aspek lingkungan fisiknya, sedangkan kinerja lingkungan kualitatif adalah hasil dari hal-hal yang terkait dengan ukuran aset *non-fisik*, seperti prosedur, proses inovasi, motivasi, dan semangat kerja yang dialami manusia pelaku kegiatan dalam mewujudkan kebijakan lingkungan organisasi, sasaran, dan targetnya.

Secara umum, untuk menentukan indikator kinerja sosial lingkungan kuantitatif dapat menggunakan metode Evaluasi Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Evaluation*) ISO 14031. Adapun garis besar metode untuk menentukan indikator kinerja lingkungan sesuai kerangka EPE ISO 14031 langkah-langkahnya adalah:

1. Mencari kriteria kinerja yang diinginkan pelanggan lingkungan yang ingin kita

dalam pelaporan kinerja lingkungan kita. Pemahaman aspek organisasional lewat gambaran profil organisasi, kebijakan lingkungan,



sasaran, visi dan misi, dan target kinerja yang diinginkan manajemen, serta kriteria pemilihan lainnya, lewat input dari manajemen dapat sebagai dasar penentuan kriteria kinerja lingkungan dan indikator yang terukur.

2. Memasukkan pertimbangan kriteria kinerja terutama terkait dengan aspek dan dampak lingkungan signifikan dalam pemetaan proses.
3. Menentukan indikator kinerja berdasarkan kriteria kinerja terpilih sebelumnya.
4. Mengadakan program manajemen lingkungan pengumpulan data dari indikator kinerja tersebut.
5. Melaporkan sebagai bahan *review* manajemen dan melakukan aksi koreksi. Indikator kuantitatif tetap punya kelemahan, antara lain tidak mampu menggambarkan proses yang sedang terjadi secara lengkap. Indikator yang sulit dijabarkan secara kuantitatif antara lain yakni yang terkait dengan aspek *intangibile* kualitatif, seperti motivasi, iklim inovasi, persepsi karyawan. Hal-hal tersebut lebih tepat jika diukur dengan pendekatan kualitatif.

Selain indikator kuantitatif, untuk mengukur kinerja sosial lingkungan bisa juga digunakan indikator kualitatif. Indikator kualitatif dalam hal ini merupakan ukuran yang didasarkan pada penilaian semantik, pandangan, persepsi seseorang berdasarkan pengamatan dan penilaiannya terhadap sesuatu hal. Indikator ini tetap penting karena menjadi bagian proses kegiatan yang berperan dalam mengukur iklim dan pendorong motivasi karyawan, untuk mewujudkan hasil kinerja yang diharapkan.

Contoh dari pengukuran kualitatif adalah penilaian terhadap sistem manajemen lingkungan yang berlaku seperti cakupan prosedur, kepuasan

n, motivasi kerja, persepsi karyawan, intensitas komunikasi yang terjadi pelanggan atau elemen organisasi lain, sistem penghargaan, proses



validitas data lingkungan, dan sebagainya. Indikator-indikator tersebut, agar optimal maka harus memiliki arah mewujudkan sasaran lingkungan yang ingin dicapai, berupa visi dan misi kebijakan yang jelas, kualitas proses produksi sesuai keinginan pelanggan, kondisi yang ingin dicapai seperti jaminan kelangsungan bisnis, dan lainnya. Indikator kualitatif ini dapat diukur dengan aktifitas *gap analysis* atau audit sistem manajemen.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen pengukuran kinerja lingkungan sosial yakni PROPER (Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan). Ini dikarenakan PROPER menghimpun aspek indikator kuantitatif sekaligus indikator kualitatif dalam melakukan pengukuran kinerja sosial lingkungan. Sistem pemeringkatan penilaian kinerja lingkungan perusahaan ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. PROPER merupakan program yang juga bertujuan sebagai pengendalian atas kinerja perusahaan akibat pencemaran yang dilakukannya. Pemeringkatan ini dibedakan berdasarkan 5 warna, yakni emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Erista (2011) berpendapat bahwa melalui PROPER perusahaan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan serta penataan lingkungan dan sosial, karena hasil dari pemeringkatan ini akan diumumkan kepada publik sehingga dapat membawa dampak untuk perusahaan.

Bagi perusahaan, informasi peringkat PROPER dapat digunakan sebagai tolok ukur serta acuan atas kinerja perusahaan, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat hijau atau emas beranggapan, bahwa hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan perusahaan dalam rangka meningkatkan citra perusahaan. Berikut adalah kriteria yang digunakan oleh

rian Lingkungan Hidup untuk dijadikan acuan dalam memberikan



peringkat pada perusahaan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan deskripsi pemeringkatan PROPER:

Tabel 1. Kriteria Pemeringkatan PROPER

Peringkat	Keterangan
Emas	untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik
Biru	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya Pengelolaan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Merah	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi

Sumber: proper.menlh.go.id

Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan apakah saja, yakni apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan



pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan:

1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya
2. Pengendalian Pencemaran Air
3. Pengendalian Pencemaran Udara
4. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
5. Pengendalian Pencemaran Air Laut
6. Potensi Kerusakan Lahan

Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Kriteria ini pada dasarnya adalah implementasi *best mining practices*, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, sehingga dapat dihindari bukaan lahan yang tidak dikelola.

Sementara itu, kriteria *beyond compliance* lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi industri, perusahaan, LSM, Universitas, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan PROPER. Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria *beyond compliance* adalah:

1. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi supplier dan konsumennya untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik.
2. Upaya Efisiensi Energi dengan mencakup empat ruang lingkup efisiensi

, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas



pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari bangunan dan sistem transportasi.

3. Upaya penurunan emisi, baik berupa emisi kriteria polutan maupun emisi dari gas rumah kaca dan bahan perusak ozon. Termasuk dalam lingkup penilaian ini adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan.
4. Implementasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin banyak upaya untuk mengurangi terjadinya sampah, maka semakin tinggi nilainya. Selain itu, semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besarpula nilai yang diperoleh perusahaan.
5. Implementasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* limbah padat non B3 kriteria sama dengan 3R untuk limbah B3.
6. Konservasi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah. Semakin kecil intensitas pemakaian air per produk, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. Demikian juga semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan maka akan semakin besar nilai yang diperoleh.
7. Perlindungan Keanekaragaman Hayati. Pada dasarnya, bukan jumlah pohon yang dinilai, tetapi lebih diutamakan pada upaya pemeliharaan dan perawatan keanekaragaman hayati. Salah satu bukti bahwa perusahaan peduli dengan keanekaragaman hayati adalah perusahaan memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumberdaya biologis yang dikelola

memiliki data tentang status dan kecenderungan sumberdaya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola.



8. Program Pengembangan Masyarakat. Untuk memperoleh nilai yang baik dalam aspek ini perusahaan harus memiliki program strategis untuk pengembangan masyarakat yang didesain untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini didasarkan atas pemetaan sosial untuk menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu. Pemetaan Sosial memberikan informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial dan analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi masalah sosial, identifikasi potensi (modal sosial) perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program community development dan identifikasi kelompok rentan yang akan menjadi sasaran program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan dan terdapat indikator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur dan tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat.

2.1.4 Luas Pengungkapan Sosial Lingkungan

Sebagai wujud transparansi, perusahaan telah menginformasikan kepada publik tentang tanggungjawab sosial lingkungan yang dilakukan ke dalam berbagai media informasi, yaitu dalam laporan tahunan dan *sustainability reporting*. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan dalam berbagai kegiatan.

Harfiahnya, perusahaan melakukan pengungkapan sosial lingkungan

yang diangkat dari harapan perusahaan untuk memperoleh *feed back*, terutama yang ekonomi (pertimbangan *trade of cost and benefit*). Sehingga,



kebijakan pelaksanaan *social responsibility* berikut pengungkapannya tidak dapat terlepas keinginan perusahaan untuk memperoleh timbal-balik dari sisi ekonomi. Berbagai pelaksanaan *social responsibility* tersebut, seperti untuk mendukung dan menjaga kontinuitas bisnis, menjaga *image* di depan masyarakat dan investor, menjaga legitimasi masyarakat, mengurangi *komplain* dalam rangka mendukung *competitive advantage* dan sejenisnya.

Menurut Harahap (1993) alasan yang mendasari perusahaan melakukan pengungkapan sosial lingkungan, antara lain:

1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat yang merupakan respon tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Keterlibatan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak polusi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan, dan investor.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
5. Meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat sesuai dengan kehendak investor.
6. Membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya.

Terkait pengungkapan sosial lingkungan, pemerintah telah menetapkan suatu regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya dan regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktifitas tanggung jawab

dalam laporan tahunan dan bagian yang sifatnya sukarela adalah pada pemilihan item-item yang diungkapkan pada pelaporannya. Kondisi



menyebabkan keberagaman hasil atau variasi luas pengungkapan sosial lingkungan oleh perusahaan.

Untuk menentukan item dari pengungkapan sosial lingkungan sepenuhnya merupakan hak dari perusahaan. Namun, bagaimanapun perusahaan membutuhkan pedoman agar pengungkapan sosial lingkungan yang dilakukan perusahaan tidak rancu dan mudah diinterpretasi oleh pihak *stakeholdersnya*. Dan salah satu pedoman pengungkapan sosial lingkungan yang paling populer adalah *Global Reporting Initiatives* (GRI).

GRI ini merupakan suatu jaringan organisasi *non*-pemerintah yang didirikan oleh CERES dan UNEP pada tahun 1997 di Boston (AS), namun pada tahun 2002 kantor pusatnya dipindahkan ke Amsterdam. GRI menghasilkan kerangka konseptual, prinsip-prinsip, pedoman, dan indikator-indikator yang diterima umum secara global untuk mendorong organisasi agar lebih transparan dan juga agar bisa digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi organisasi dalam suatu media pelaporan yang terintegrasi yang disebut *Sustainability Reporting*.

Selain mengatur prinsip-prinsip pelaporan dan transparansi, GRI juga mengatur tentang HAM, tenaga kerja, anti korupsi, dan lingkungan (www.globalreporting.org). GRI menyusun GRI-G4 sebagai salah satu *guidelines* yang diharapkan dapat menjadi alat bantu setiap perusahaan dalam menyusun laporan CSR perusahaan.

Gambaran lengkap mengenai indikator GRI-G4 dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 2. Indikator GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang diterima pemerintah.
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan.
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan didasarkan pada berat dan volume.
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang.
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi.
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi.
	EN5	Intensitas energi.
	EN6	Pengurangan konsumsi energy.
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi.



	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber.
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung.
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung.
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan.
	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan.
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1).
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2).
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3).
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
	EN19	Pengurangan emisi GRK.
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO).
	EN21	NOx, Sox dan emisi udara signifikan lainnya.
Air dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas.
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis dan metode pembuangan.



	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan.
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 Lampiran I, II, III dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional.
	EN26	Identitas, ukuran dan status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi.
	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa.
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori.
	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi nonmoneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja.
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis.
Asesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan.
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasikan dan tindakan yang diambil.
Mekasnisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekasnisme pangaduan resmi.



KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan.
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender.
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikn saran program kesehatan dan keselamatan kerja.
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender.
	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka.
Pelatihan dan Pendidikan	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja.
	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan.
	LA10	Program manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti.



	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular menurut gender dan kategori karyawan.
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya.
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesment Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktik ketenagakerjaan.
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Hak Asasi Manusia		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia.
Non Diskriminasi	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi.
	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil.
San Berserikat	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin



dan Perjanjian Kerja Bersama		melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif.
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja.
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi.
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil.
Asesment	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan <i>review</i> atau <i>assesment</i> dampak hak asasi manusia.
Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia.
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan.



KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Masyarakat		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, dampak & pengembangan.
	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal.
	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi.
Anti Korupsi	SO4	Komunikasi dan pelatihan terkait kebijakan dan prosedur anti korupsi.
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/ penerima manfaat.
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, antitrust, serta praktik monopoli dan hasilnya.
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non moneter atas ketidakpatuhan terhadap undangundang dan peraturan.
<i>Assesment</i> Pemasok atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat.
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensional yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil.
	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.



KATEGORI SOSIAL		
Sub Kategori : Tanggungjawab atas Produk		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan. Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak
	PR2	kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil.
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi sejenis.
	PR4	Jumlah total insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa.
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan.
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan.
	PR7	Jumlah total insiden ketidak patuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil.
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa.

Sumber : www.globalreporting.org



2.2. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang *social cost*, kinerja sosial lingkungan, dan luas pengungkapan sosial lingkungan telah dilakukan oleh beberapa para peneliti antara lain:

1. penelitian yang dilakukan oleh Ioannis Ioannou, George Serafeim dengan judul *What Drives Corporate Social Performance? International Evidence from Social, Environmental and Governance Scores*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *social cost* yang diberikan perusahaan maka kinerja sosial lingkungan lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji –t yaitu bahwa *social cost* meningkatkan tanggung jawab sosial sebesar 0,02, tanggung jawab lingkungan oleh 0,04.
2. penelitian yang dilakukan oleh Ramin Gamerschlag, Klaus Muller, dan Frank Verbeeten dengan judul *Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany*. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa Pengungkapan sosial secara positif dengan menbaiknya hubungan antara perusahaan *stakeholdersnya* di Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang menunjukkan angka 0,025. Dengan taraf signifikansi 0,05 maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
3. penelitian yang dilakukan oleh Lindrianasari (2007) dengan judul hubungan antara kinerja lingkungan dan kualitas pengungkapan lingkungan dengan kinerja ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan dan kinerja ekonomi diukur dengan menggunakan *DER, export, ownership, margin, dan age*. Uji statistik dilakukan dengan regresi berganda. Adapun hasil penelitian menunjukan

terdapat hubungan positif signifikan antara kinerja lingkungan yang baik dan pengungkapan lingkungan dan tidak terdapat hubungan positif



signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi kecuali variabel umur yang memperlihatkan hubungan positif signifikan.

4. Penelitian yang dilakukan Fitriyani (2012) dengan judul Keterkaitan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan sosial dan Kinerja Finansial Kinerja lingkungan, CSR *Disclosure*, kinerja finansial menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sosial tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. Lalu Pengungkapan sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan. Hal ini dibuktikan dari uji statistik dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi berganda.
5. pada penelitian yang dilakukan oleh Djajadikerta dan Tireksani (2012) dengan judul "*Corporate Social and Environmental Disclosure by Indonesian Listed Companies on Their Corporate Web Sites*" dengan teknik metode content analysis, menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sosial lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia masih tergolong rendah. Informasi yang paling banyak diungkapkan adalah komunitas dan sumber daya manusia.
6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nor Hadi (2011) dengan judul "Interaksi Tanggung Jawab Sosial, Kinerja Sosial, Kinerja Keuangan, dan Luas Pengungkapan Sosial" dengan Teknik analisis jalur *social cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan. Dan juga kinerja sosial diungkapkan mampu memediasi hubungan antara *social cost* dengan luas pengungkapan sosial perusahaan.

penelitian yang dilakukan oleh Indah (2014), dengan judul "Pengaruh *social cost* dan Pengungkapan sosial terhadap Kinerja Keuangan dengan



Kinerja Sosial sebagai Variabel Mediasi” dengan teknik analisis model persamaan struktural menunjukkan bahwa *Social cost* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sosial dan kinerja sosial, tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu hasil lain menunjukkan Pengungkapan sosial tidak dapat memediasi hubungan *social cost* terhadap kinerja keuangan sedangkan kinerja sosial mampu memediasi hubungan *social cost* terhadap kinerja keuangan.

